

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alrasid, Harun, *Naskah Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, UI Press: Jakarta, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

_____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2008.

A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

A. W. Widjaja,. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2008.

Anwar C. *Teori Hukum dan konstitusi*, Malang: Intrans Publising, 2010.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1778.

_____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Cet. Ketigapuluhan, 2008.

Busrizalit, H.M, *Hukum Penda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media: Yogyakarta, 2013.

Chaidir, Ellydar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Djohermansyah, Otonomi Daerah Masa Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin (1945-1965), dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, *Pasang-Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute For Local Development, Jakarta, 2005.

Eko, Sutoro, *Masa Lalu, Masa Kini, Masa Depan Otonomi Desa*, Institute For Research and Empowerment, Yokyakarta, 2008.

Eko, Sutoro, *Masal Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, *Pasang-Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute For Local Development, Jakarta, 2005,

Fadli, Moh. Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, UB Press: Malang, 2014.

G. Kartasapoetra, dkk., *Desa dan Daerah dengan tata pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta 1986.

Gayatri, Irene Hiraswati (edit), *Runtuhnya Gampong di Aceh, Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan* Setara Press: Malang, 2015.

Huda, Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Huda, Ni'matul, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Hadikoesoemo, Soetardjo Karto, *Desa*, cet. Kedua, Sumur Bandung: Yogyakarta, 1965.

_____, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, Cet. II, 2006.

Koesnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pertama, Jakarta, cet. Kedua, 1998.

Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, penerj. Raisul Muttaqien, Nusa Media: Bandung, 2006.

Kleden, Emil Ola, *Masyarakat Adat*, dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)*”, cetakan kesembilan belas, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,1987.

Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta. 2013.

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang, Setara Press, 2012.

Manan, Bagir, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang pelaksanaannya)*, Bandung: Uniska, 1993

_____, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan,1994.

_____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII: Yogyakarta, 2002.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke-4, 2011

Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Mahfud MD, Moh.,*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.

Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indah, Jakarta, 1982.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio -Legal atas Konstituante 1956-1959*, Terjemahan dari *The*

Aspirationa for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesia Konstituante 1956-1959, alih bahasa Sylvia Tiwon, Cetakan Ke-9, Grafiti, Jakarta, 2009.

Raharusun, Anthon, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam periode 1950-2012*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2000.

_____, *Negara Kesatuan, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung, 2006.

Rafael, Edy Bosko, *Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, diterjemahkan oleh Aviva Nababan, ELSAM, Jakarta 2006.

Rasyid, M. Ryass, "Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa Depannya", dalam Syamsudin Haris (editor), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Lipi Press: Jakarta, 2005.

Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.

RM. A.B. KUSUMA, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2011.

Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Edisi ke-2, Cet. Ke-1, P.T Alumni: Bandung, 2006.

Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*, Erlangga: Jakarta, 2014.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty: Yogyakarta, cet. Kedelapan, 2008.

Soehino, *Hukum Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 Adalah Negara Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1985.

Sukrino, Didik, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Surianingrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta: Jakarta, 1992.

Surianingrat, Bayu, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 tahun 1979*, Metro Pos, Jakarta, 1980

Soekanto, Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah*, Eresco Terate, Bandung.1998.

Soemantri, Sri, *Otonomi Daerah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, *Republik Desa ,Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah*, P.T Alumni: Bandung, 2010.

Thaib, Dahlan, (et.al), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, cet.11, 2011.

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Liberty: Yogyakarta, 1993.

Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid II, Liberty: Yogyakarta, 1994.

Tutik,Titik Triwulan *Kosntruksi Hukum Tatanegara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press: Malang, 2013.

Wiryono, *Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Wheare, K.C. *Konsititusi-Konstitusi Modern*, Terjemahan Imam Baihaqi, Bandung: Nusa Media, 1996.

Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, cetakan pertama, 1959.

Jurnal dan Makalah

Al Rafni, “Marjinalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 7 No. 1 tahun 2008.

Adhuri, Dedi Supriadi, “Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 68 tahun 2002.

Arya Sunu, I Gusti Ketut dkk. “Harmonisasi, Integrasi, Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multigama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2014.

Dewi, Susi Fitria, “Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto, Sijunjung Sumatera Barat”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5 No. 1 tahun 2006

Kurniawan, Andri, “Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3 September 2010.

Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No 2 Tahun 2014.

Mandasari, Zayanti, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 21 April 2014.

Mahmudin (et.al), "Revitalization of Gampong Institution in Aceh: Measuring the Program of "Back to Gampong" in the Middle of the Changing Society: A case in Aceh Besar Regency", *International Journal of Sociology and Anthropology*, Vol. 6 (9), September 2014.

Mulyanto, "Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Bali dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Mimbar Hukum*, Volume 27 Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 419

Nurcholis, Hanif "Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Prima, Afdhal, "Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Pdang Magek Kabupaten Tanah Datar)", *Jurnal Jom FIFIP*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014.

Rahman, Irfan Nur dkk., "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.

Syamsudin, Mohammad, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 15 Juli 2008,

Subardi, Lalu, "Kontruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD RI TAHUN 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-43 No.2 April-Juni 2013.

Setiada, Nengah Keddy, "Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali", *Jurnal Pemukiman Natah* Vol. 1 No. 2 Juni 2003.

Suwaryono, Utang "Mengembalikan Otonomi untuk Desa", *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1 November 2011.

Thontowi, Jawahir, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 1 Juni 2015.

Wasitiono, Sadu, "Kajian Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan Dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004.

Yunus, Yasril, "Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau", *Jurnal Demokrasi*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2007.

Zakaria, R. Yando "Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia", Makalah yang disampaikan pada *Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945* dengan tema "Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah?". Diselenggarakan di Jakarta, tanggal 9-10 Oktober 2012.

Disertasi dan Tesis

Attamimi, Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita VI)", *Disertasi Universitas Indonesia*, Jakarta, 1990.

Khairuddin, "Dekontruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Disertasi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 241, yang dikutip dari M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1979.

Zayanti Mandasari, "politik hukum pemerintahan desa (studi perkembangan pemerintahan desa di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)".*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Opini dan Berita Koran

Eko, Sutoro, "Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan" *Opini harian Kompas edisi 16 November 2015*.

Muhammad, Farouk, "Menjaga Momentum Undang-Undang Desa", *Opini Harian Kompas*, 5 Juli 2015.

Zakaria, Yando, "Tiga Tahun UU Desa", *Opini Harian Kompas*, 11 Februari 2017.

Sujito, Arie, "Mencegah Politisasi Dana Desa", *Majalah Detik, Edisi 163, 12-18 Januari 2015*

14 Daerah belum terima dana desa tahap I, *Harian Kompas*, 26 Juli 2016.

Aturan Dasar dan Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945;

Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949;

Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara 1950;

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah;

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Indonesia, **Undang-undang** Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Wawancara

Wawancara dengan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, pada 17 Juni 2016 pukul 17.30

Wawancara dengan Dadang Juliantara, anggota Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) di Toko Buku Gramedia pada hari jumat, 17 Februari 2017 pukul 14.30

Wawancara dengan Yando Zakaria, Praktisi Antropologi, *fellow* pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, di Rumah Karsa, Dusun Jambon, RT 05/RW 23, Desa Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55291, pada hari Senin, 27 Februari 2017, pukul 14.30

Naskah Akademik dan Risalah Sidang

E.B. Sitorus, dkk. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Direktorat Pemerintahan Desa dan Pemerintahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Menteri Dalam Negeri, Jakarta, 2007.

Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945, penyunting penyelia, Saafroedin Bahar, dan Nanie Hudawati, Cet. I, Edisi IV, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998.

Mahkamah Konstitusi RI, *naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945*, buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, 2008.

Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku IV Kekeuasan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kosntitusi, Jakarta Pusat, 2010.

Internet

<http://www.teropongsenayan.com>, Rebutan Dana Desa demi politik 2019, diakses pada hari kamis, 23 Februari 2016, Pukul 21.06

<http://www.merdeka.com>, Nasib Menteri Marwan, Rebutan Dana Desa hingga tak ada mitra di DPR. diakses pada hari kamis, 23 Februari 2016, Pukul 21. 15

<http://www.beritasatu.com>, Jokowi Diingatkan bahaya politisasi UU Desa, diakses pada hari kamis, 23 Februari 2016, pukul 21.30

Yando Zakaria, Tiga Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa, diunduh dari <https://independent.academia.edu>

www.beritasatu.com Penyaluran Dana Desa 2016 Tersendat, Kemdesa Terjunkan Tim, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2016

<http://finansial.bisnis.com> Target Penyaluran Dana Desa Tahap I Belum Tercapai, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016

<http://nasional.kompas.com>, Kampanye, Ical “jual’ undang-undang desa, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 20.37

<http://bisniskeuangan.kompas.com>, Prabowo Klaim UU Desa berkat komitmen dirinya, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 20.46

<http://nasional.kompas.com>, Implementasikan UU Desa, Prabowo-Hatta Janji Gelontorkan Rp 1 Miliar per tahun, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 20.48

<http://news.detik.com>, Prabowo-Hatta Janji Rp 1 M per Desa, Jokowi-JK janjikan Rp 1, 4 M, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 21. 05

<https://m.tempo.co>, Desa dijadikan Jualan Calon Jabar Satu, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 23.35

<http://www.beritasatu.com>, Hati-hati Politisasi Dana Desa Demi Pilkada, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 21.00

<http://m.harianjogja.com>, kepala desa rawan dimanfaatkan untuk kampanye, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 21.17

<http://regional.kompas.com>, Terbukti Ikut Kampanye, Kepala Desa Divonis 5 tahun penjara, diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 21.23

<http://www.republika.co.id>, Dana Desa Kuasa Siapa?, diakses pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 9.34

<http://nasional.kompas.com>, kawal dana deaa, 12.000 Pendamping diresmikan hari ini. diakses pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 11.35

<https://news.detik.com>, Eks Fasilitator PNPM Surati Jokowi, Minta Stop Politisasi Pendamping Dana Desa, diakses pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 11.3

<http://www.beritasatu.com>, Politisasi Dana Desa, diakses pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 11.43